

B.g



**LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN MUDA**

**KESIAPAN GURU MATA PELAJARAN BAHASA  
INDONESIA DI SMP SWASTA KOTA BENGKULU  
DALAM MELAKSANAKAN KURIKULUM  
BERBASIS KOMPETENSI**

**Oleh :**

**Drs. M. Arifin, M.Pd.**

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian  
Nomor : 009 / SP3 / PP / DP2M / II / 2006  
Tanggal 01 Pebruari 2006

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
2006**



**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL  
PENELITIAN DOSEN MUDA**

1. Judul Penelitian : Kesiapan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia  
di SMP Swasta Kota Bengkulu Menerapkan  
Kurikulum Berbasis Kompetensi
2. Bidang Ilmu : Pengajaran
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Drs. M. Arifin, M.Pd.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP : 131813923
  - d. Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III d
  - e. Jabatan : Lektor
  - f. Fakultas/Jurusan : KIP/Pendidikan Bahasa dan Seni
4. Jumlah Tim Peneliti : 1 orang
5. Lokasi Penelitian : Kota Bengkulu
6. Bila penelitian ini merupakan kerja sama kelembagaan
  - a. Nama instansi :-
  - b. Alamat :-
7. Waktu Penelitian : 8 bulan
8. Biaya : Rp 7.000.000,-

Bengkulu, 11 September 2006

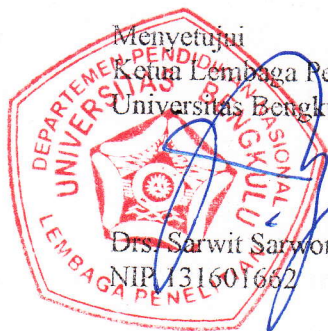
Mengetahui  
Dekan FKIP Universitas Bengkulu

Ketua Peneliti,



Drs. Saiful, M.A., Ph.D.  
NIP 131577385

Drs. M. Arifin, M.Pd.  
NIP 131813923



Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Bengkulu

Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.  
NIP 131601662

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN DAN SUMMARY</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>4</b>
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	<b>7</b>
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	<b>8</b>
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>10</b>
<b>BAB VI SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>27</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>28</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>29</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak bergulirnya semangat reformasi pada pertengahan tahun 1998, banyak perubahan yang dialami oleh bangsa dan masyarakat Indonesia dalam hal kehidupan dan bernegara. Wujud nyata dari perubahan itu adalah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan pelbagai bidang pemerintahan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dan masa datang.

Sejalan dengan itu, Diknas (2001) menegaskan hal penting yang menjadi tema sentral berkaitan dengan bidang pendidikan diakhir abad ke-20 yaitu GBHN 1999 dan UU Nomor 22 tentang Otonomi Daerah. Implikasi dari diberlakukanya peraturan perundang-undangan tersebut yaitu bahwa dalam bidang pendidikan secara simultan perlu dilakukan penyempurnaan baik terhadap sistem pendidikan pada umumnya maupun terhadap kurikulum pada khususnya.

Sebagai upaya untuk merespon tuntutan agar kurikulum diperbaharui, maka Pusat Kurikulum dan Badan Penelitian dan Pengembangan sejak tahun 1999, telah menyusun seperangkat naskah kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Sampai saat ini, kerja tim telah menghasilkan draf tentang landasan pengembangan kurikulum, standar kompetensi dasar mata pelajaran, contoh silabus mata pelajaran, dan penjelasan program nonmata pelajaran. Mulai tahun 2001, draf tersebut mulai disosialisasikan di lingkungan terbatas, instruktur dan guru inti setiap mata



pelajaran, pihak Diknas kota, kabupaten, dan propinsi serta kalangan perguruan tinggi dengan tujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan draf menjadi naskah jadi. Sejak tahun 2002, sosialisasi KBK dilakukan lebih gencar dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi melibatkan guru setiap mata pelajaran, kepala sekolah tingkat SLTP dan SMU serta kalangan perguruan tinggi dan draf yang disosialisasikan pun merupakan draf 90 persen jadi. Gencarnya sosialisasi ini dilakukan sangat dapat dipahami. Mengingat, KBK akan diresmikan pada tanggal 2 Mei 2004 dan mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2004/2005 pertengahan Juli 2004. Alasan lain lagi adalah terdapatnya komponen yang berbeda antara kurikulum sebelumnya dengan KBK. Menurut Diknas (2002) pembaharuan kurikulum yang terdapat dalam KBK meliputi hal-hal berikut : (1) adanya konsep standar nasional yang memuat tiga komponen, yaitu standar kompetensi, standar materi, indikator pencapaian, (2) mekanisme pengembangan kurikulum di daerah, (3) penjurusan (khusus di SMU), (4) program akselerasi, (5) penilaian berbasis kelas (PBK) dengan mengutamakan authentic assessmen, dan (6) manajemen peningkatan mutu berbasis kelas (MPMBS).

Terdapatnya perbedaan komponen antara kurikulum sebelumnya dengan KBK, juga dialami dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMU. Menurut Diknas (2001) perbedaan kurikulum sebelumnya dengan KBK hanya terletak pada kewenangan pengembangannya. Kurikulum yang dikeluarkan dari pusat bersifat global sebagai acuan standar nasional sedangkan pengembangan secara operasional dilakukan di daerah. Pendekatan seperti ini memiliki beberapa kelebihan antara lain: (1) daerah lebih luwes menyesuaikan materi pelajaran sesuai dengan keadaan sekolah, (2) guru dan sekolah berpeluang untuk berkreasi dan berinisiatif sesuai dengan kemampuan dan minatnya, (3)

sekolah diberi peluang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensinya, (4) guru lebih bebas memilih topik/tema, dan (5) memudahkan sistem evaluasi.

Diasumsikan, perbedaan yang dimaksud sewajarnya telah dipahami dan diketahui oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMU swasta di Kota Bengkulu sebelum mereka melaksanakan pada tahun ajaran 2004/2005. Pengetahuan dan pemahaman guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMU swasta di Kota Bengkulu sekali diasumsikan diperoleh melalui sosialisasi yang telah dilakukan.

Sejauh pengamatan peneliti, sampai saat ini, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMU swasta di Kota Bengkulu yang telah mengikuti sosialisasi KBK masih dalam jumlah yang terbatas. Biasanya, yang mengikuti sosialisasi itu terbatas pada instruktur mata pelajaran dan guru inti mata pelajaran. Sementara, guru-guru lain mendapatkan informasi tentang KBK melalui bahan tertulis yang dibawa instruktur dan guru inti atau diskusi dengan teman sejawat. Kondisi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMU swasta di Kota Bengkulu yang demikian tentu sangat tidak mendukung dalam pelaksanaan KBK. Padahal, waktu pelaksanaan KBK hanya tinggal empat bulan lagi. Bertolak dari fenomena itulah maka penelitian tentang kesiapan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMU swasta Kota Bengkulu perlu dilakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kesiapan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP swasta kota Bengkulu dalam melaksanakan KBK?

## Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Bahan Sosialisasi: Pengembangan Kurikulum Berbasis Kemampuan Dasar Sekolah Menengah Umum*. Jakarta: Dikdasmen.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk SMU*. Jakarta: Dikdasmen.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Ringkasan Kurikulum dan hasil Belajar*. Jakarta: Dikdasmen.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Ringkasan Penilaian Berbasis Kelas*. Jakarta: Dikdasmen.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Ringkasan Kegiatan Belajar-Mengajar*. Jakarta: Dikdasmen.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Ringkasan Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dikdasmen.
- Riyanto. 1995. *Kesiapan Siswa, Orang Tua, Guru, Administrator Sekolah dalam Menyongsong Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Propinsi Bengkulu*. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian UNIB.
- Sardiman. 1998. *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar*. Jakarta: Rajawali.